

KINERJA KEUANGAN KOTA BENGKULU BERDASARKAN ANALISA LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2018-2022

Zakky Nagoya
NPP. 31.0292

Asdaf Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Program Studi Keuangan Publik
Email: zakkynagoya@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Budi Margono, S.Pd, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The contribution of original regional income to the total regional income of Bengkulu City does not reach 20%, which shows the weak contribution of original regional income to regional income. Financial performance based on the Bengkulu City regional financial analysis is expected to be a solution in increasing Bengkulu City's original regional income so that it is able to finance its government affairs independently. **Purpose:** This research aims to analyze financial ratios in assessing the financial performance of the Bengkulu City government during the 2018-2022 period, as well as to determine the factors inhibiting financial performance. The financial ratios analyzed include the Regional Original Income Effectiveness Ratio, Regional Independence Ratio, Degree of Decentralization Ratio, and Regional Financial Dependency Ratio. **Method:** The method used is descriptive qualitative using secondary data in the form of the Bengkulu City Government Budget Realization Report. **Result:** The results of research using the Effectiveness Ratio obtained an average result of 88.59% in the less effective category, the Regional Independence Ratio obtained an average result of 20.33%, a very low category with an instructive relationship pattern. The Degree of Decentralization Ratio obtained a result of 15.56% in the poor category. The Regional Dependency Ratio obtained a result of 76.78% in the very high category. **Conclusion:** It can be concluded that the financial performance of the Bengkulu City Government during the five year period cannot still be said to be good. The inhibiting factor for financial performance is that local revenue receipts are still not optimal, which is influenced by the lack of facilities and infrastructure, lack of awareness of taxpayers and levies, as well as minimal supervision through regional tax and levy regulations. Therefore, it is necessary to take corrective action to assess the financial performance of the Bengkulu City government by adding facilities and infrastructure to support regional tax and levy activities, providing outreach to taxpayers and levies, as well as improving tax and levy regulations in Bengkulu City. In this way, it is hoped that good financial performance will be realized and have a direct impact on community welfare.

Keywords: *Financial Ratio Analysis, Regional Original Income, Financial Performance*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Bengkulu tidak mencapai angka 20%, yang menunjukkan lemahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Kinerja keuangan berdasarkan Analisa keuangan daerah kota Bengkulu diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota

Bengkulu sehingga mampu membiayai urusan pemerintahannya secara mandiri. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rasio keuangan dalam menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2018-2022, serta untuk mengetahui faktor penghambat kinerja keuangan. Rasio keuangan yang dianalisis meliputi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi, dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah. **Metode:** Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bengkulu. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian dengan menggunakan Rasio Efektivitas memperoleh hasil rata-rata sebesar 88,59% dengan kategori kurang efektif, Rasio Kemandirian Daerah memperoleh hasil rata-rata sebesar 20,33%, kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio Derajat Desentralisasi memperoleh hasil sebesar 15,56% dengan kategori kurang. Rasio Ketergantungan Daerah memperoleh hasil sebesar 76,78% dengan kategori sangat tinggi. **Kesimpulan:** kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu selama kurun waktu lima tahun tersebut masih belum dapat dikatakan baik. Adapun faktor penghambat kinerja keuangan tersebut adalah masih belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah yang dipengaruhi oleh faktor minimnya sarana dan prasarana, kurangnya kesadaran wajib pajak dan retribusi, serta minimnya pengawasan melalui regulasi perpajakan dan retribusi daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan perbaikan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu melalui penambahan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perpajakan dan retribusi daerah, pemberian sosialisasi kepada para wajib pajak dan retribusi, serta pembenahan terhadap regulasi perpajakan dan retribusi di Kota Bengkulu. Dengan demikian, diharapkan dapat terwujudnya kinerja keuangan yang baik dan berdampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. **Kata kunci:** Analisis Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan asas Desentralisasi Daerah turut diikuti dengan pemberian sebagian kewenangan fiskal kepada daerah dalam lingkup daerahnya sendiri dengan tetap mematuhi keputusan dan ketetapan Pemerintah Pusat, sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan dalam suatu sistem yang turut mengatur hak dan kewajiban keuangan keduanya, dan diterapkan secara adil, transparan, akuntabel sesuai dengan undang-undang, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dan mampu dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Tinggi rendahnya tingkat kemandirian daerah dalam mengelola keuangan dapat dilihat dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (Mokodompit et al., 2014).

Pengelolaan terhadap keuangan daerah dan anggaran daerah merupakan salah satu tugas penting bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah merupakan salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan yang memegang peranan penting dalam rangka melaksanakan segala kewajiban urusan pemerintahan termasuk dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, memberikan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Herdiyana & Andriana, 2020). Dengan demikian kinerja keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat juga dimaknai sebagai suatu bentuk ukuran kapasitas dari proses pengelolaan keuangan daerah dalam satu periode anggaran (Nuzullestary & Mulyaningsih, 2021). Pengukuran kinerja keuangan daerah dilakukan untuk mengetahui dan menilai apakah pengelolaan

anggaran yang dilakukan pemerintah daerah efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Berdasarkan pernyataan tersebut, diharapkan melalui pengukuran kinerja keuangan daerah dapat diketahui tentang proses pengelolaan keuangan suatu daerah, meliputi: kondisi keuangan pemerintah daerah, pelaksanaan program pemerintah daerah dan proses pembiayaannya, serta untuk melakukan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan program, dengan tetap memperhatikan ketepatan dan kesesuaian laporan keuangan dengan undang-undang.

Pemerintah Kota Bengkulu menerapkan otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui hal tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan secara mandiri.

Selama lima tahun, jumlah penerimaan daerah melalui pendapatan asli daerah Kota Bengkulu berada pada rata-rata 179,316 miliar pertahun, dimana penerimaan pendapatan asli daerah terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar Rp 200,42 miliar dan penerimaan terkecil pada tahun 2020 yakni sebesar 155,15 miliar. Hal ini menandakan selama 5 tahun terakhir, kontribusi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah Kota Bengkulu tidak mencapai angka 20%, yang menunjukkan lemahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah. Hal ini dikarenakan sedikitnya pendapatan asli daerah yang diterima yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Hal tersebut menunjukkan kinerja keuangan Kota Bengkulu masih belum dapat dikatakan baik dan perlu dilakukan peningkatan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pokok permasalahan yang menjadi fokus oleh peneliti dalam penelitian adalah mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 – 2022 yang merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sehingga mampu membiayai urusan pemerintahannya secara mandiri.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait kinerja keuangan daerah berdasarkan laporan keuangan. Penelitian Agus Tri Sulistyono berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Sulistyo, 2018), bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik. Penelitian oleh Lala Novikasari dan Zulkarnain berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Zulkarnain, 2020), bahwa Pemerintah Kota Sukabumi pada tingkat kemampuan daerah tergolong cukup dan pencapaian target tahunan PAD sudah sangat efektif, namun rasio belanja modal masih rendah. Penelitian oleh Triska Omega Fatmawati berjudul Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Fatmawati & Sapari, 2020) mengemukakan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Novira Sartika berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti (Sartika, 2019) menemukan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat

menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya serta Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Penelitian oleh Kadek Martini dan Dwirandara berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali (Martini & Dwirandra, 2015) bahwa Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. Penelitian oleh D. Kartika, AB Setiawan, dan IC Kusuma berjudul Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi (Kartika & Kusuma, 2015) menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 rasio kemandirian keuangan kabupaten sukabumi tergolong sangat rendah (instruktif), rasio efektivitas PAD yang sangat efektif (105,67%), dan rasio efisiensi PAD yang tergolong sangat efisien (5,02%). Penelitian oleh Ritno H. Rondonuwu, dkk. berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Rondonuwu et al., 2016) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Penelitian oleh Heri Faisal Harahap berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli (Harahap, 2020) menemukan bahwa bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Pemerintahan Daerah Tengah secara umum dikatakan cukup baik, meskipun rasio derajat keuangannya masih tergolong rendah ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai target yang dianggarkan. Pemkab Tapanuli Tengah memperbaiki data wajib pajak daerah, menggali potensi baru sumber pendapatan daerah, dan meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi. Penelitian oleh Hery Susanto berjudul Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram (Susanto, 2019) mengemukakan bahwa rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang. Penelitian oleh Anim Rahmayati berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 (Rahmayati, 2016) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda penelitian yang dilakukan berfokus pada mengetahui dan menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 – 2022. Penelitian ini menggunakan teori Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi, 2019) untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dalam menentukan informan dan memperoleh suatu data pada penelitian ini peneliti menggunakan angket sederhana, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian yang dilaksanakan peneliti dalam melakukan pencapaian hasil penelitian yang memiliki tujuan untuk dapat mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis kinerja keuangan Kota Bengkulu berdasarkan analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 – 2022, mengetahui dan menganalisis hambatan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengatasi hambatan.

II. METODE

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pada penelitian ini pengumpulan data dikumpulkan berdasarkan uraian-uraian secara verbal seperti narasi-narasi (Adlini et al., 2022). Peneliti juga menggunakan pendekatan induktif yaitu pendekatan dengan pemahaman konsep dari khusus ke umum, lalu kemudian melakukan penarikan kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta empiris di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori Analisis Kemandirian Keuangan Daerah (Mahmudi, 2019) dengan menggunakan rasio keuangan yang meliputi 4 dimensi yaitu rasio efektivitas pendapatan asli daerah, rasio kemandirian daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio ketergantungan keuangan daerah. Selain itu, peneliti juga menemukan berbagai faktor-faktor penghambat kinerja keuangan Kota Bengkulu serta Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Mengatasi Hambatan dan Kendala Kinerja Keuangan Daerah

3.1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil memenuhi target pendapatan asli yang telah ditetapkan dalam anggaran (Mahmudi, 2019:141). Jika rasio ini mendekati 100%, menandakan bahwa pemerintah daerah semakin efektif dalam mencapai target pendapatan yang telah ditentukan.

Adapun hasil perhitungan Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 1
Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD(Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas PAD (%)	Kriteria
2018	182.884.786.411,00	192.543.390.250,00	94,98	Cukup Efektif
2019	182.798.143.645,00	176.390.125.327,00	103,36	Sangat Efektif
2020	155.149.376.261,00	233.369.479.182,00	66,48	Tidak Efektif
2021	175.336.537.813,00	208.775.296.312,00	83,98	Kurang Efektif
2022	188.854.052.491,00	238.502.623.990,00	79,18	Kurang Efektif
Rata-rata			85,59	Kurang Efektif

Berdasarkan data yang tertera pada tabel di atas, selama lima tahun terakhir, rata-rata nilai rasio efektivitas pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Bengkulu adalah 85,59%, yang menunjukkan tingkat efektivitas yang kurang efektif

3.2. Rasio Kemandirian Daerah

Rasio Kemandirian menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam membiayai operasionalnya sendiri tanpa mengandalkan intervensi atau bantuan dari pemerintah pusat. lebih tinggi. Rasio Kemandirian dihitung dengan membandingkan total Pendapatan Asli Daerah dengan jumlah transfer yang diterima oleh pemerintah daerah. Adapun hasil perhitungan Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2
Rasio Kemandirian Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Transfer Pusat+Provinsi +Pinjaman (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kriteria	Pola Hubungan
2018	182.884.786.441,00	856.865.595.899,00	21,34	Sangat Rendah	Instruktif
2019	182.798.143.645,00	913.742.634.220,00	20,01	Sangat Rendah	Instruktif
2020	155.149.376.261,00	859.912.855.994,00	18,04	Sangat Rendah	Instruktif
2021	175.336.537.813,00	842.478.593.772,00	20,81	Sangat Rendah	Instruktif
2022	188.854052.491,00	876.787.773.667,00	21,48	Sangat Rendah	Instruktif
Rata-rata			20,33	Sangat Rendah	Instruktif

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Kemandirian Pemerintah Bengkulu selama periode 2018-2022 rata-rata berada di angka 20%. Pada periode 2018-2022, rata-rata nilai rasio kemandirian yang dihitung hanya 20,33%, mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu masih belum mandiri dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan urusan pemerintahan lainnya.

3.3. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio Derajat Desentralisasi menunjukkan proporsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan kontribusi pendapatan asli dalam pembiayaan urusan pemerintahan. Rasio Derajat Desentralisasi diukur dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Total Pendapatan Daerah selama tahun anggaran yang sama. Adapun hasil perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3

Rasio Derajat Desentralisasi Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi (%)	Kriteria
2018	188.884.786.441,00	1.170.304.479.927,00	16,67	Kurang
2019	182.798.143.645,00	1.170.304.479.927,00	15,61	Kurang
2020	155.149.376.261,00	1.079.664.992.073,00	14,37	Kurang
2021	175.336.537.813,00	1.145.295.835.182,00	15,30	Kurang
2022	188.854.052.491,00	1.167.229.763.187,00	16,17	Kurang
Rata-rata			15,62	Kurang

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata nilai rasio derajat desentralisasi Pemerintah Kota Bengkulu hanya sebesar 15,62 % dengan kategori kurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu belum mampu mengambil peran yang lebih dominan dibandingkan pemerintah pusat dalam pembiayaan pelaksanaan urusan pemerintahan.

3.4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengukur proporsi pendapatan transfer terhadap total pendapatan daerah dengan membandingkannya. Perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat mengukur sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada campur tangan keuangan dari pihak luar dalam mengelola urusan pemerintahan. Selama periode 2018-2022, Sebagian besar Pendapatan Daerah Kota Bengkulu berasal dari pendapatan transfer. Adapun hasil perhitungan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 4

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018-2022

Tahun	Pendapatan Transfer (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	Kriteria
2018	856.865.595.899,00	1.096.906.666.865,00	78,11	Sangat Tinggi
2019	913.742.634.220,00	1.170.304.479.927,00	78,07	Sangat Tinggi
2020	859.912.855.992,00	1.079.664.992.073,00	79,07	Sangat Tinggi
2021	842.478.593.772,00	1.145.295.835.182,00	73,55	Sangat Tinggi
2022	876.787.773.667,00	1.167.229.763.187,00	75,11	Sangat Tinggi
Rata-rata			76,78	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk nilai rasio ketergantungan keuangan daerah, perolehan nilai yang didapatkan cukup besar untuk Pemerintah Kota Bengkulu. Rata rata nilai rasio ketergantungan yang didapatkan adalah 77%, yang mana nilai rasio tersebut menunjukkan bahwasanya Pemerintah Kota Bengkulu memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap bantuan dana transfer dari pemerintah pusat.

3.5. Faktor- Faktor Penghambat Kinerja Keuangan Kota Bengkulu

Berikut ini adalah berbagai faktor-faktor yang menjadi penghambat kinerja keuangan Kota Bengkulu :

1. Selama proses pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bengkulu menghadapi beberapa tantangan, yang meliputi kekurangan pegawai dalam jumlah yang cukup (kuantitas) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, serta kurangnya tenaga ahli yang mempunyai keterampilan khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah (kualitas).
2. Keterbatasan sarana dan prasarana di Pemerintah Kota Bengkulu masih menjadi penghambat dalam menyediakan layanan yang memadai kepada wajib pajak dan pengelolaan retribusi daerah.
3. Banyak wajib retribusi di Kota Bengkulu yang menggunakan sistem penilaian mandiri (self-assessment), yang berpotensi memicu kecurangan. Contoh kecurangan ini adalah wajib retribusi yang tidak transparan dalam melaporkan omzet usahanya.
4. Kurangnya regulasi atau aturan yang memadai mengenai pajak daerah dan retribusi di Kota Bengkulu menyebabkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan wajib pajak dan retribusi terhadap kewajiban perpajakan menjadi tidak efektif, terutama dalam hal perhitungan, pembayaran, dan pelaporan retribusi daerah dengan benar.

3.6. Upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam Mengatasi Hambatan dan Kendala Kinerja Keuangan Daerah

Pemerintah Kota Bengkulu telah menerapkan beberapa strategi untuk mengatasi hambatan dan kendala, serta meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, yang meliputi:

1. Merekrut tenaga ahli dengan keahlian khusus di bidang keuangan dan menyelenggarakan pelatihan untuk pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pengelolaan keuangan.
2. Mengalokasikan sebagian dari anggaran daerah untuk menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung layanan kepada wajib pajak dan retribusi.
3. Melaksanakan sosialisasi kepada wajib pajak dan wajib retribusi mengenai pentingnya kesadaran dan kepatuhan pajak, serta transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak.
4. Memperbaiki sistem administrasi, prosedur pengawasan perpajakan dan retribusi, serta meningkatkan penegakan hukum di Kota Bengkulu.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini menganalisa kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi dan menjadi penghambat dalam kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Analisis rasio keuangan terhadap menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian dengan menggunakan Rasio Efektivitas yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 88,59% dengan kategori kurang efektif, Rasio Kemandirian Daerah memperoleh hasil rata-rata sebesar 20,33%, kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio Derajat Desentralisasi memperoleh hasil sebesar 15,56% dengan kategori kurang. Rasio Ketergantungan Daerah memperoleh hasil sebesar 76,78% dengan kategori sangat tinggi. Adapun hambatan yang ditemukan yaitu belum optimalnya pemungutan pajak, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam bidang keuangan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, dan regulasi atau aturan mengenai pajak dan retribusi yang masih belum memadai. Berdasarkan hasil temuan yang didapatkan oleh penulis hal ini tentu berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agus Tri Sulistyio berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Sulistyo, 2018), bahwa Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sudah baik. Penelitian oleh Lala Novikasari dan Zulkarnain berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi (Zulkarnain, 2020), bahwa Pemerintah Kota Sukabumi pada tingkat kemampuan daerah tergolong cukup dan pencapaian target tahunan PAD sudah sangat efektif, namun rasio belanja modal masih rendah. Penelitian oleh Triska Omega Fatmawati berjudul Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (Fatmawati & Sapari, 2020) mengemukakan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan DAU berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian oleh Novira Sartika berjudul Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Meranti (Sartika, 2019) menemukan bahwa Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup efisien dalam mengelola keuangannya dikarenakan sudah dapat menekan jumlah belanja daerahnya yang tidak melebihi pendapatan daerahnya serta Pemerintah Daerah sudah efektif dalam mengelola PAD. Penelitian oleh Kadek Martini dan Dwirandara berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali (Martini & Dwirandra, 2015) bahwa Kinerja keuangan yang terdiri dari rasio ketergantungan berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efektivitas PAD

berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal, rasio tingkat pembiayaan SiLPA berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio ruang fiskal berpengaruh positif dan signifikan pada alokasi belanja modal, rasio efisiensi berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja modal, dan rasio kontribusi BUMD berpengaruh positif namun tidak signifikan pada alokasi belanja modal. Penelitian oleh D. Kartika, AB Setiawan, dan IC Kusuma berjudul Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi (Kartika & Kusuma, 2015) menunjukkan bahwa dari tahun 2009-2013 rasio kemandirian keuangan kabupaten sukabumi tergolong sangat rendah (instruktif), rasio efektivitas PAD yang sangat efektif (105,67%), dan rasio efisiensi PAD yang tergolong sangat efisien (5,02%). Penelitian oleh Ritno H. Rondonuwu, dkk. berjudul Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (Rondonuwu et al., 2016) mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa tahun 2010 sampai 2014 berjalan dengan baik atau sangat efektif. Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi dengan target Pendapatan Asli Daerah. Penelitian oleh Heri Faisal Harahap berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli (Harahap, 2020) menemukan bahwa bahwa kinerja keuangan Kabupaten Tapanuli Tengah Pemerintahan Daerah Tengah secara umum dikatakan cukup baik, meskipun rasio derajat keuangannya masih tergolong rendah ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat/Provinsi masih sangat tinggi dan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak tercapai target yang dianggarkan. Pemkab Tapanuli Tengah memperbaiki data wajib pajak daerah, menggali potensi baru sumber pendapatan daerah, dan meningkatkan sosialisasi manfaat pajak dan retribusi. Penelitian oleh Hery Susanto berjudul Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mataram (Susanto, 2019) mengemukakan bahwa rasio efektivitas dikategorikan efektif, rasio efisiensi dikategorikan tidak efisien, rasio kemandirian pengelolaan keuangan daerah masih rendah, rasio aktifitas kurang baik, rasio pertumbuhan pada komponen PAD kurang baik, sementara pada komponen rasio pendapatan daerah dikategorikan sedang. Penelitian oleh Anim Rahmayati berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013 (Rahmayati, 2016) menemukan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo masih belum optimal. Walaupun dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sudah efektif dan efisien, tetapi tingkat kemandirian daerah masih sangat rendah. Hal ini dapat dibuktikan dari besarnya bantuan dari pusat dan provinsi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, dalam penggunaan dananya masih belum berimbang karena sebagian besar dana digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Analisis rasio keuangan masih dikatakan kurang memuaskan atau belum efektif sehingga masih perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah Kota Bengkulu serta berbagai hal yang menjadi kendala perlu diatasi. Hasil ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya koordinasi, penegakan hukum, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang optimal dalam Kinerja Keuangan Daerah. Namun, setiap daerah memiliki tantangan spesifiknya sendiri.

3.8. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa secara garis besar Kinerja keuangan berdasarkan Analisa laporan keuangan daerah Kota Bengkulu diharapkan menjadi solusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Bengkulu sehingga mampu membiayai urusan pemerintahannya secara mandiri. Terdapat beberapa hambatan yang diidentifikasi oleh penulis, salah satunya masih belum optimalnya pemungutan pajak dan retribusi daerah yang ditunjukkan dengan nilai rasio ketergantungan keuangan daerah Kota Bengkulu yang sangat tinggi yang menyebabkan tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bengkulu terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

IV. KESIMPULAN

Kinerja keuangan daerah Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Analisis rasio keuangan terhadap menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil penelitian dengan menggunakan Rasio Efektivitas yang memperoleh hasil rata-rata sebesar 88,59% dengan kategori kurang efektif, Rasio Kemandirian Daerah memperoleh hasil rata-rata sebesar 20,33%, kategori sangat rendah dengan pola hubungan instruktif. Rasio Derajat Desentralisasi memperoleh hasil sebesar 15,56% dengan kategori kurang. Rasio Ketergantungan Daerah memperoleh hasil sebesar 76,78% dengan kategori sangat tinggi. Beberapa faktor penghambat kinerja keuangan Pemerintah Kota Bengkulu termasuk belum optimalnya pemungutan pajak, yang dipengaruhi oleh keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya sumber daya manusia yang berkualifikasi dalam bidang keuangan, serta rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi. Masalah ini diperparah oleh regulasi atau aturan mengenai pajak dan retribusi yang masih belum memadai, mengakibatkan pengawasan dan penegakan hukum yang kurang efektif terhadap wajib pajak dan retribusi yang tidak patuh. Selain itu, tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Bengkulu terhadap bantuan dari pemerintah pusat juga tercermin dari nilai rasio ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi. Pemerintah Kota Bengkulu telah mengambil beberapa upaya, termasuk mengalokasikan anggaran untuk memperbaiki dan menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung layanan perpajakan dan retribusi. Selain itu, pemerintah kota juga telah menambah jumlah tenaga ahli dan menyelenggarakan pelatihan bagi pegawai di sektor keuangan. Langkah-langkah ini dilengkapi dengan perbaikan dan peningkatan layanan pajak dan retribusi yang berbasis teknologi untuk mempermudah proses dan meningkatkan efisiensi.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu, adanya keterbatasan informasi dalam meneliti dan keterbatasan waktu yang dimiliki penulis selama proses penelitian dilaksanakan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan kinerja keuangan berdasarkan analisa laporan keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bengkulu beserta jajarannya yang telah memberikan peneliti kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu peneliti menyelesaikan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Fatmawati, T. O., & Sapari, S. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(4).
- Harahap, H. F. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 34–38.
- Herdiana, D., & Andriana, N. (2020). Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 4(1), 191–203.
- Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis rasio kemandirian, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi PAD pada laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) kabupaten sukabumi. *Jurnal Akunida*, 1(2), 23–34.
- Mahmudi. 2019. *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit STIM YPKN.
- Martini, K., & Dwirandra, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah pada Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10(2), 426–443.
- Mokodompit, P. S., Pangemanan, S. S., & Elim, I. (2014). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(2).
- Nuzullestary, V., & Mulyaningsih, E. (2021). Kinerja Pengelolaan Keuangan Dan Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Cilegon Berdasarkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015-2019. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 44–58.
- Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).
- Rondonuwu, R. H., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. (2016). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(4).
- Sartika, N. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Meranti. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 7(2), 147–153.
- Sulistyo, A. T. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 43–59.

Susanto, H. (2019). Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah kota mataram. *Jurnal Distribusi-Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 7(1), 81–92.

Zulkarnain, Z. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. *Progress: Jurnal Pendidikan, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 204–2015.

